

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

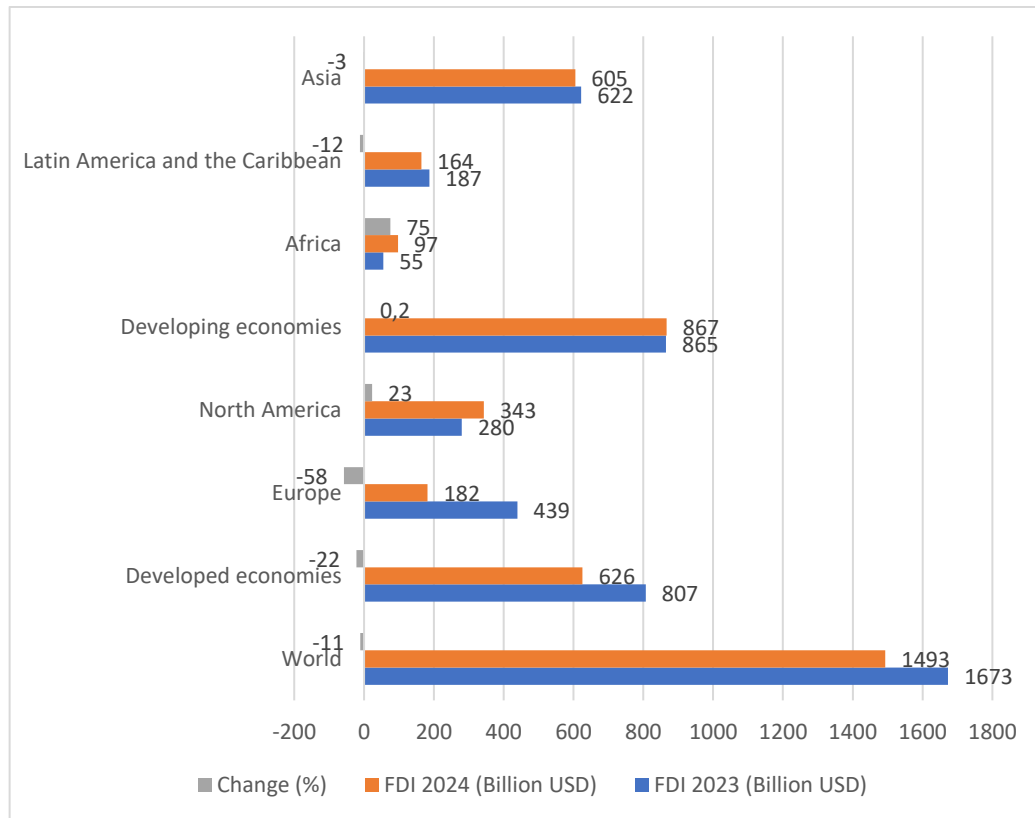
Perkembangan ekonomi global selama dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi, percepatan inovasi teknologi, dan perubahan pola perdagangan internasional. Salah satu elemen krusial yang terus mendapat perhatian dari berbagai negara adalah aliran *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI memainkan peran penting tidak hanya sebagai sumber dana eksternal, tetapi juga sebagai pendorong transfer teknologi, peningkatan produktivitas, dan perluasan pasar global. Namun, aliran FDI secara global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang tidak stabil, bahkan cenderung stagnan, terutama disebabkan oleh ketegangan geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan ketidakpastian pasar. Laporan Investasi Dunia 2024 yang dirilis oleh Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan yaitu *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menyatakan bahwa aliran FDI global turun sebesar 2 persen, mencapai sekitar USD 1,3 triliun pada 2023. Penurunan ini bahkan lebih signifikan jika mengabaikan beberapa penyimpangan statistik dari fluktuasi aliran modal di ekonomi perantara Eropa, yang jika diabaikan, menunjukkan kontraksi lebih dari 10 persen.

Laporan *World Investment Report 2024* yang diterbitkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menunjukkan bahwa perlambatan arus *Foreign Direct Investment* (FDI) global memberikan tekanan struktural yang besar terhadap kinerja investasi internasional. UNCTAD juga

mencatat bahwa perlambatan investasi tersebut tidak hanya memengaruhi sektor-sektor konvensional, tetapi turut menghambat upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendanaan proyek pada sektor-sektor strategis, seperti ketahanan pangan, air dan sanitasi, serta energi terbarukan mengalami penurunan lebih dari 10 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis global yang berkepanjangan telah melemahkan komitmen negara dan investor terhadap pembangunan jangka panjang. Arus FDI pada akhirnya tidak lagi hanya mencerminkan perpindahan modal antarnegara, tetapi juga menjadi indikator stabilitas tata kelola global, efektivitas kebijakan publik, dan kapasitas institusional suatu negara dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Perkembangan arus *Foreign Direct Investment* (FDI) global selama periode 2014–2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan politik internasional. Arus FDI sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 serta meningkatnya aktivitas *merger* dan akuisisi lintas batas. Peningkatan tersebut kemudian tidak berlanjut karena tingginya suku bunga global, pengetatan likuiditas di pasar keuangan internasional, serta meningkatnya ketegangan geopolitik yang memperbesar ketidakpastian investasi. Fragmentasi rantai pasok global, menguatnya kecenderungan deglobalisasi, dan penerapan kebijakan proteksionisme di sejumlah negara maju turut mengurangi daya tarik investasi asing secara global. Pola perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pergerakan FDI semakin dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang kompleks dan sulit diprediksi. Kondisi tersebut dapat diamati pada Gambar 1.1 yang menyajikan perkembangan arus masuk FDI berdasarkan kelompok ekonomi

dan wilayah selama periode 2023–2024, sehingga memberikan gambaran mengenai disparitas daya tarik investasi antara negara maju dan negara berkembang.



Sumber: UNCTAD, (2025)

Gambar 1.1 Arus Masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) Berdasarkan Kelompok Ekonomi dan Wilayah, 2023–2024 (miliar USD dan persentase)

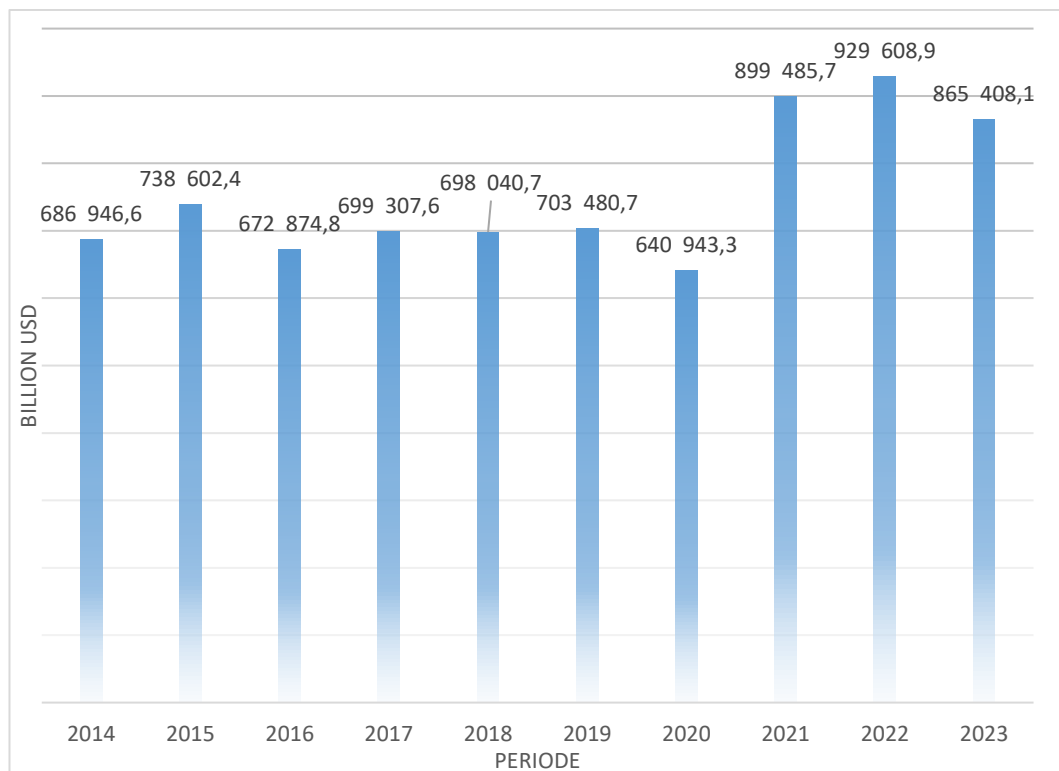
Tren stagnasi dan fluktuasi dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) semakin memberikan tekanan pada negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada investasi asing sebagai motor pertumbuhan ekonomi. UNCTAD (2024) melaporkan bahwa aliran FDI ke negara-negara berkembang turun sebesar 7 persen pada tahun 2023, mencapai USD 867 miliar. Namun, penurunan ini tidak merata. Asia berkembang yang selama ini menjadi penerima terbesar FDI menurun sebesar 8 persen, termasuk penurunan besar di China dan India. Di sisi

lain, Afrika hanya mengalami penurunan 3 persen, meskipun nilai investasi secara absolut jauh lebih rendah dibandingkan dengan kawasan Asia. Amerika Latin dan Karibia relatif stabil dengan penurunan hanya 1 persen, namun distribusi investasi masih sangat terkonsentrasi di sektor komoditas dan mineral.

Perbedaan kemampuan negara berkembang dalam menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam daya saing investasi antarwilayah. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang kompleks karena di satu sisi membutuhkan investasi asing untuk memperkuat kapasitas produksi, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi, sedangkan di sisi lain masih dihadapkan pada kelemahan tata kelola pemerintahan, keterbatasan infrastruktur digital, serta ketergantungan yang tinggi terhadap sektor-sektor konvensional. Keterbatasan tersebut mengurangi kemampuan negara berkembang dalam merespons perubahan kebijakan investasi global secara adaptif sehingga peluang untuk menarik investasi berkualitas tinggi pada sektor manufaktur berteknologi maupun jasa berbasis pengetahuan menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan negara berkembang lebih rentan terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan ketidakpastian politik dibandingkan negara maju yang telah memiliki fondasi kelembagaan dan infrastruktur digital yang lebih kuat.

Perkembangan arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara berkembang selama periode 2014–2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Nilai FDI berada pada kisaran USD 686–699 miliar selama periode 2014–2018, kemudian menurun menjadi USD 640 miliar pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Arus investasi tersebut selanjutnya meningkat hingga mencapai USD 929 miliar pada tahun 2022 sebelum kembali menurun menjadi

USD 865 miliar pada tahun 2023. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa arus masuk FDI di negara berkembang masih sangat rentan terhadap berbagai guncangan eksternal. Gambaran mengenai dinamika tersebut disajikan pada Gambar 1.2 sebagai ilustrasi perkembangan arus masuk FDI di negara-negara berkembang selama periode pengamatan.



Sumber: UNCTAD, (2025)

Gambar 1.2 Arus Masuk FDI, Negara Berkembang (2014–2023)

Kondisi ini semakin memburuk akibat penurunan pembiayaan proyek internasional, yang merupakan unsur krusial dalam pengembangan infrastruktur di negara-negara berkembang. Ketergantungan negara berkembang pada modal asing semakin meningkat seiring dengan kebutuhan untuk memperluas konektivitas digital, memperkuat kemampuan inovasi, dan meningkatkan daya saing industri domestik dalam rantai pasok global.

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan multinasional dalam melakukan investasi langsung di suatu negara. Salah satu faktor yang semakin mendapat perhatian dalam literatur ekonomi internasional adalah digital capability, yaitu kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, inovasi, serta kualitas pelayanan publik. Digital capability mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan infrastruktur digital, tingkat adopsi teknologi informasi dan komunikasi, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan institusi dalam mendukung transformasi digital (D. Zhang et al., 2024). Negara dengan tingkat digital capability yang tinggi cenderung memiliki iklim usaha yang lebih efisien karena mampu menekan biaya transaksi, meningkatkan konektivitas, dan mempercepat proses bisnis. Kondisi tersebut pada akhirnya meningkatkan daya tarik negara sebagai tujuan investasi bagi perusahaan multinasional yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Digitalisasi tanpa didukung oleh tata kelola yang kuat tidak akan cukup untuk menarik investasi berkualitas. Tata kelola pemerintah terhadap institusi, yang tercermin dalam indikator Efektivitas Pemerintah, Kualitas Regulasi, dan Pengendalian Korupsi, memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Investor asing umumnya menghindari negara dengan tingkat ketidakpastian regulasi yang tinggi, birokrasi yang rumit, dan risiko korupsi yang besar. Sebaliknya, negara dengan institusi yang kuat dapat menawarkan stabilitas, transparansi, dan kepastian yang diperlukan untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang.

Ketimpangan pembangunan ekonomi di antara negara-negara berkembang secara langsung mempengaruhi perbedaan dalam efektivitas tata kelola dan adopsi teknologi digital. Negara dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi umumnya memiliki institusi yang lebih kokoh dan tingkat tata kelola pemerintah yang lebih tinggi, sementara negara-negara dengan pendapatan yang lebih rendah sering menghadapi hambatan dalam membangun infrastruktur digital yang dapat dipercaya dan sistem tata kelola yang efektif. Menurut *World Bank* (2024), negara-negara berkembang dikelompokkan berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita ke dalam tiga kategori, yaitu: pendapatan menengah atas (USD 4.466–13.845), pendapatan menengah bawah (USD 1.146–4.465), dan pendapatan rendah (kurang dari USD 1.145).

Variasi kondisi *digital capability* dan kualitas tata kelola pemerintahan di antara negara-negara berkembang tidak bersifat homogen, melainkan mencerminkan kesenjangan struktural yang signifikan. Hal ini tercermin secara empiris dalam data aktual tahun 2023 pada Tabel 1.1, yang menyajikan perbandingan indikator *digital capability*, kualitas tata kelola, dan arus masuk FDI pada sembilan negara berkembang dengan karakteristik yang beragam.

Tabel 1.1 Variasi *digital capability*, Kualitas Tata Kelola, dan Arus Masuk FDI di Negara Berkembang, tahun 2023

Negara	IUI (%)	GII	FTRI	GOV	RQ	CoC	FDI (% GDP)
Uganda	15,25	16,00	0,2	-0,55	-0,52	-1,04	6,14
Vietnam	78,08	35,96	0,6	+0,13	-0,38	-0,42	4,26
Philippines	83,77	32,16	0,6	+0,15	+0,16	-0,54	2,04
Thailand	89,54	37,10	0,7	+0,17	+0,16	-0,49	2,00
Malaysia	97,69	40,87	0,8	+0,88	+0,66	+0,30	1,98
Indonesia	69,21	30,30	0,5	+0,58	+0,30	-0,49	1,57

India	55,90	38,11	0,7	+0,48	-0,14	-0,37	0,77
Burkina Faso	17,02	14,50	0,2	-0,83	-0,49	-0,17	0,54
Bangladesh	44,50	20,18	0,4	-0,70	-0,91	-1,12	0,32

Sumber: World Bank (2024), WIPO (2024), UNCTAD (2024)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hubungan antara digital capability, kualitas tata kelola pemerintahan, dan arus masuk FDI di negara berkembang tidak selalu bersifat linear. Jika negara-negara sampel diurutkan berdasarkan besaran FDI, terlihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara negara dengan tingkat FDI tertinggi dan terendah. Uganda menempati posisi pertama dengan arus masuk FDI sebesar 6,14 persen terhadap GDP meskipun memiliki tingkat penggunaan internet, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi, serta kualitas tata kelola yang relatif rendah dibandingkan sebagian besar negara lainnya. Sebaliknya, Malaysia yang memiliki capaian tertinggi pada hampir seluruh indikator digital capability dan tata kelola pemerintahan hanya mencatat FDI sebesar 1,98 persen terhadap GDP.

Perbandingan kondisi antara Vietnam dan India menunjukkan adanya variasi hubungan antara digital capability, kualitas tata kelola pemerintahan, dan arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Vietnam berhasil memperoleh arus masuk FDI sebesar 4,26 persen terhadap GDP meskipun beberapa indikator tata kelola pemerintahannya masih berada pada level yang relatif rendah. India, di sisi lain, memiliki skor *Global Innovation Index* dan *Frontier Technology Readiness Index* yang relatif tinggi, namun hanya memperoleh arus masuk FDI sebesar 0,77 persen terhadap GDP. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa negara dengan kualitas digital dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik tidak selalu memperoleh arus masuk FDI yang lebih tinggi dibandingkan negara lain yang memiliki capaian indikator lebih rendah. Kesenjangan tersebut mengindikasikan

bahwa hubungan antara digital capability, kualitas tata kelola pemerintahan, dan arus masuk FDI bersifat kompleks serta tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui pengamatan deskriptif. Variasi karakteristik ekonomi, institusi, dan kondisi makroekonomi antarnegara berkembang memungkinkan terjadinya perbedaan respons investor terhadap faktor-faktor penentu investasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris yang lebih komprehensif untuk menguji bagaimana digital capability dan kualitas tata kelola pemerintahan memengaruhi arus masuk FDI, baik secara parsial maupun simultan, dengan mempertimbangkan peran variabel makroekonomi sebagai faktor kontrol.

Kajian empiris mengenai determinan *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara-negara berkembang secara umum masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Studi-studi yang menempatkan kesiapan digital sebagai determinan utama daya tarik investasi seperti (Adel, 2024) dan (Yin & Choi, 2021) cenderung membahasnya dalam kerangka inklusi ekonomi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dinamika arus investasi asing. Sebaliknya, penelitian yang berfokus pada kualitas tata kelola institusional, seperti (Maranik et al., 2024) dan (Sabir et al., 2019), belum mengintegrasikan kapasitas digital sebagai variabel penjelas yang relevan. Fragmentasi fokus kajian tersebut menyebabkan pemahaman mengenai interaksi antarvariabel khususnya dalam konteks negara berkembang yang memiliki karakteristik struktural heterogen menjadi terbatas dan belum menghasilkan kesimpulan yang konklusif. Dengan demikian, terdapat celah empiris (*research gap*) dalam literatur mengenai hubungan simultan antara *digital capability*, kualitas tata kelola pemerintahan, dan FDI dalam satu model yang terintegrasi. Kondisi ini diperparah oleh dominasi pendekatan estimasi statis dalam literatur terdahulu yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakter

intertemporal investasi asing maupun potensi endogenitas antara FDI dan variabel penjelasnya; hal ini menyebabkan estimasi yang dihasilkan rentan terhadap bias simultanitas.

Keterkaitan antara kesiapan digital, kualitas institusi, dan stabilitas makroekonomi secara bersama-sama membentuk lingkungan investasi yang menentukan arah dan besaran arus masuk FDI di negara-negara berkembang. Integrasi ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis yang dinamis diperlukan guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai determinan investasi asing. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *digital capability*, kualitas tata kelola pemerintah, dan variabel makroekonomi terhadap arus masuk FDI secara simultan dengan menggunakan pendekatan *System Generalized Method of Moments* (System-GMM) pada data panel 71 negara berkembang periode 2014–2023, guna menghasilkan estimasi yang lebih *robust* dan mampu meminimalkan bias endogenitas dalam analisis determinan FDI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *digital capability* (*Individuals Using Internet* (IUI), *Global Innovation Index* (GII), dan *Frontier Technology Readiness Index* (FTRI)) berpengaruh signifikan terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang pada periode 2014–2023?
2. Apakah kualitas tata kelola pemerintah (*Government Effectiveness* (GOV), *Regulatory Quality* (RQ), dan *Control of Corruption* (CoC)) berpengaruh signifikan terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang pada periode 2014–2023?

3. Apakah *digital capability* dan kualitas tata kelola pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang pada periode 2014–2023 setelah mengontrol variabel inflasi (INF), pertumbuhan ekonomi (GDP), dan keterbukaan perdagangan (TO)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menguji pengaruh *digital capability* (*Individuals Using Internet* (IUI), *Global Innovation Index* (GII), dan *Frontier Technology Readiness Index* (FTRI)) terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang pada periode 2014–2023.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh kualitas tata kelola pemerintah (*Government Effectiveness* (GOV), *Regulatory Quality* (RQ), dan *Control of Corruption* (CoC)) terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang pada periode 2014–2023.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh simultan *digital capability* dan kualitas tata kelola pemerintah terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang pada periode 2014–2023 dengan mengontrol variabel inflasi (INF), pertumbuhan ekonomi (GDP), dan keterbukaan perdagangan (TO).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur determinan FDI dengan mengintegrasikan tiga kerangka teori secara simultan *Dunning's Eclectic Paradigm*, *Endogenous Growth Theory*, dan *Institutional Theory* dalam

satu model empiris pada konteks negara berkembang. Hasil penelitian memperkaya pemahaman bahwa peran masing-masing dimensi *digital capability* dan kualitas tata kelola terhadap FDI bersifat variatif, sehingga memberikan tambahan bukti empiris bahwa faktor lokasi investasi tidak dapat digeneralisasi secara seragam. Secara metodologis, penggunaan System-GMM pada data panel 71 negara berkembang periode 2014–2023 memberikan kontribusi berupa estimasi yang lebih konsisten dalam menangani endogenitas dan heteroskedastisitas yang umum ditemui pada studi lintas negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi berbasis bukti empiris bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun kawasan, khususnya pemerintah negara berkembang, lembaga regional seperti ASEAN, serta organisasi internasional seperti UNCTAD dan World Bank. Temuan penelitian secara khusus dapat memberikan panduan dalam dua prioritas utama: pertama, penguatan kualitas regulasi dan ekosistem inovasi digital mengingat *Regulatory Quality*, penetrasi internet, dan kapasitas inovasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap daya tarik FDI; kedua, pemeliharaan stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi dan perluasan keterbukaan perdagangan sebagai fondasi iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.